

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh

TITIN MULYANI

07 206 025



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**



**Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah
Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
di Propinsi Sumatera Barat**

Oleh : Titin Mulyani

(Dibawah bimbingan Nasri Bachtiar dan Hefrizal Handra)

RINGKASAN

Desentralisasi Fiskal ditujukan untuk mengatasi ketimpangan di berbagai daerah dan sektor ekonomi, sehingga dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah diharapkan alokasi anggaran akan semakin efisien sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 memungkinkan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam memperoleh bagi hasil yang lebih besar untuk memacu pertumbuhan ekonominya, sedangkan daerah-daerah yang minim sumber daya alamnya upaya yang dapat dilakukan adalah mengelola pengeluarannya dengan efisien.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 adalah sebesar 5.69 persen, namun rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB sangat variatif berkisar 5.86 persen hingga 37 persen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat dan menganalisis pola pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Barat sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengeluaran pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sistim sentralistik yang dianut Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar di berbagai daerah dan di berbagai sektor ekonomi. Melalui Desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 (yang kemudian diganti menjadi Undang – undang Nomor 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai ketimpangan tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien sehingga mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, serta penyerapan tenaga kerja . Disamping itu juga diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para pelaku di daerah. Dengan demikian desentralisasi fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif, terutama menyangkut pemerataan PDRB per kapita di Indonesia. Pemerataan pendapatan ini akan berarti meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja di

daerah, termasuk pekerjaan yang berpendapatan tinggi (*high paying jobs*). (Makmun, 2004).

Melalui pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Diawal pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah daerah terlalu kreatif menciptakan pungutan-pungutan daerah yang justru dapat mengganggu aliran investasi yang masuk. Padahal investasi swasta memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*).

Semangat desentralisasi fiskal itu sendiri adalah meningkatkan peran daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga beban untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, karena daerah dianggap lebih mengerti akan masalah dan potensi perekonomian yang dimilikinya.

Pelayanan Publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Desentralisasi fiskal diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah akan menyebabkan daerah mampu mendorong tingkat pertumbuhan yang pada akhirnya akan dapat menurunkan angka kemiskinan karena daerah lebih mengetahui potensi dan permasalahan daerahnya.

Data-data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah antara kelompok kabupaten dan kota. Hasil analisis pada bab sebelumnya menunjukkan perbedaan pengaruh variabel belanja modal, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kedua kelompok analisis yaitu kelompok kabupaten dan kota.

Dari analisis regresi linier berganda diketahui bahwa secara umum ketiga variabel bebas tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meskipun dengan bentuk dan besaran pengaruh yang berbeda-beda. Secara lebih rinci pengaruh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio belanja modal terhadap PDRB tidak signifikan menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi untuk kelompok kabupaten, sedangkan untuk kelompok kota berpengaruh positif dan signifikan menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi yang diamati.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S**, 2000, *Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Kongres ISEI XIV, Makassar.
- BPS Sumatera Barat**, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat*, berbagai terbitan, Padang.
- , *Sumatera Barat Dalam Angka*, berbagai terbitan, Padang.
- , *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat menurut Kabupaten Kota*, berbagai terbitan, Padang.
- BAPPEDA Sumatera Barat**, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi*, berbagai terbitan, Padang.
- , 2007, *Investasi dan ICOR Sumatera Barat 2000-2006*, Padang.
- BAPPENAS**, 2007, *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 : Memaksimalkan peluang baru*.
- , 2006, *Kajian Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor* oleh Bappenas.
- BKPMMD Sumatera Barat**, *Statistik Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat*, berbagai terbitan, Padang.
- Bank Indonesia Sumatera Barat**, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah*, berbagai terbitan, Padang.
- Brahmantio, I dan Triwibowo**, 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal pada era otonomi daerah (studi kasus : Sektor pendidikan di kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6 No. 1.
- Brata, Aloysius Gunadi**, 2004, *Komposisi penerimaan sector public dan pertumbuhan ekonomi regional*, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Darwanto, Yulia Yustikasari**, 2007, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.